

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang lahir pada masa kenabian Muhammad SAW dengan penyampaian-penyampaian wahyu dari Allah melalui lisan suci nan mulianya malaikat Jibril sehingga tidak ada keraguan didalamnya selama-lamanya. Allah SWT pencipta alam semesta dan seisinya mengutus Rasulullah tidak semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq dan mengemban tugas kenabian saja, akan tetapi banyak makna yang kemudian tidak dapat disampaikan secara dzahir sampai berakhirnya tugas kenabian tersebut.

Islam adalah agama penyempurna, Nabi Muhammad SAW juga penyempurna syari'at Nabi-Nabi sebelum beliau. Syari'at Islam melalui *al-Qur'an* dan Hadits sudah sangat jelas dan rinci sekali mengatur kehidupan manusia dari aktivitas sebangun dari tidur sampai tidur lagi, dari siang sampai malam, dari masa manusia sejak dalam kandungan, sampai kematiannya. Begitu komprehensif dan kompleks namun indah jika dijalani dan difahami maksud dan tujuan dari Syari'at tersebut bagi manusia di muka bumi ini.

Islam adalah agama yang indah dan komprehensif. Komprehensif atau menyeluruh artinya adalah Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan baik personal maupun komunal. Islam datang sebagai jawaban atas kejahiliyahan atau kebodohan yang menimpa kemanusiaan di muka

bumi ini. Banyak diantara manusia lupa akan hal tersebut. Salah satunya yang diatur oleh Islam adalah perkara perkawinan. Islam secara lengkap mengatur perkara perkawinan baik secara materil maupun formil. Solusi dari berbagai problematika dari pra-perkawinan sampai pada berkehidupan pasca perkawinan pun sudah jelas dan lengkap termuat dalam Islam.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin Antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ta'rif perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ ۖ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."*³

¹ Pustaka: yayasan peduli anak negeri (YPAN), *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Lembaran Negara, 1974, 2.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 374.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. As-Syifa', 1998), 115.

Dalam perkawinan, ada rukun-rukun serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam prosesi perkawinan. Rukun adalah dasar pondasi atau perilaku atau sesuatu yang terletak pada serangkaian inti yang harus dilakukan demi sahnya suatu perbuatan. Syarat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum melakukan serangkaian acara, kegiatan, atau perkara inti. Rukun dan syarat adalah perkara yang sangat urgent dalam perkara keberlangsungan pernikahan demi tercapainya tujuan pernikahan tersebut. Sah dan tidaknya pernikahan tersebut tergantung pada rukun dan syaratnya. Jika tidak terpenuhi maka batal/fasid suatu pernikahan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 menyebutkan bahwa rukun perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qobul.⁴ Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Kalaupun dilangsungkan, maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Perkawinan seharusnya memperhatikan hal-hal yang bersifat urgent seperti rukun dan syarat ini. Bukan memperhatikan hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau hal yang sejenisnya.

Perkawinan bagi pemeluk agama Islam telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum menghadirkan wali adalah wajib bagi pemeluk agama Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sampai pasal 23 mengatur tentang wali tersebut.⁵ Peraturan perundang-undangan yang

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 116-117.

⁵ *Ibid.*

mengatur hal demikian juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 pasal 18 tentang Pencatatan Nikah poin 1 sampai dengan poin nomor 5 jelas dengan keterangan yang sangat mudah difahami mengenai syarat-syarat wali nasab.

Kewajiban adanya wali dalam perkawinan pada hakikatnya adalah kesepakatan mayoritas para ulama, kecuali pada madzhab Hanafi yang mana tidak wajib untuk mensyaratkan adanya wali bagi perempuan dalam perkawinan terlebih-lebih jika wanita tersebut sudah sangat dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan.

Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan ummatnya. Kebahagiaan dan kesejahteraan ummat itu diukur dari bagaimana suatu ibadah, dikerjakan dengan sempurna dan khusyu'. Perkawinan dalam Islam akan sah jika tertunaikan rukun dan syarat. Salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya wali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rosulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [رواه
احمد]⁶

Artinya:

Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Hayyan abu Khalid, dari Hajaj dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan

⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, diikuti catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqam wa af'al* (Beirut: al-Maktabah al Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

penguasa/sultan dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”

Diantara macam-macam wali, kita mengenal istilah wali *Adhal* yang mana pengertiannya adalah wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu* atau setara dengan alasan yang *syar'i* namun, jika *Adhal*-nya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut *Adhal* namanya. Seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah *misil*, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.⁷

Terdapat satu kasus yang menarik terkait wali *Adhal* di Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Blitar, Jawa Timur. Enggannya wali tersebut disebabkan karena kepercayaan adat yang dipegang erat oleh keluarga pemohon dan calon suaminya.

Pengadilan Agama Blitar menetapkan penetapan tentang perkara Wali *Adhal* dalam penetapan No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL. Disini Hakim sebagai penakar perkara yang mana berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah masuk ke Pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Duduk perkara dari perkara ini adalah Hakim menetapkan wali *Adhal* terhadap wali

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 253.

nasab yang enggan menikahkan putrinya disebabkan kepercayaan adat yang dianut oleh pihak keluarga pemohon.

Kepercayaan adat tersebut yaitu kepercayaan bahwa rumah pemohon apabila di tunjuk dari rumah orang tua calon suami Pemohon menunjuk ke arah Barat Laut (*Ngakor Ngulon*), sehingga menurut perhitungan (*weton*) kurang baik untuk dinikahkan. Beberapa alasan lain adalah bahwa karena ayah calon suami anaknya sudah meninggal, sehingga nantinya apabila anak tersebut dan calon suaminya tetap menikah ditakutkan diantara orang tuanya akan meninggal salah satunya.

Hakim memiliki kewajiban berganda dalam tubuhnya sebagai pelaksana kekuasaan. Dimana Hakim satu sisi adalah pejabat yang bertugas menerapkan hukum yang konkrit normatif dan di sisi lainnya sebagai instrument dalam penegakan keadilan dituntut untuk mengikuti, menggali dan faham terhadap nilai-nilai yang mengalir di masyarakat. Maka, ada banyak aspek sebenarnya yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memutuskan perkara baik aspek yuridis, sosiologis, bahkan psikologis para pihak yang berperkara.

Memutus perkara wali adhol, jika tidak bijak, maka bisa berakibat "memutus" tali kasih antara orang tua yang tak mau menikahkan anaknya (dengan berbagai alasan) dengan anak yang memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Jika kekerasan hati orang tua tak pernah luluh, maka sepanjang perkawinan si anak, bisa-bisa tidak mendapatkan restu dari orang tua.

Hal ini yang kadang secara manusia biasa menjadi hal terberat ketika hakim memutuskan perkara tersebut. Maka, dalam hal ini hakim memiliki wewenang dalam memutuskan suatu perkara yang telah menjadi kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi di lain sisi hakim juga sangat perlu memperhatikan hukum yang mengalir dan berkembang di masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum dari Jerman mengemukakan tentang teori tujuan hukum. Beliau menyatakan bahwa dalam menegakkan dan menjunjung tinggi hukum maka ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Namun, terkadang semakin lama semakin kesini banyak hukum yang luput dari ketiga unsur tersebut. Bahkan, terkadang ketika salah satu unsur tersebut sudah memenuhi, di sisi lain mengenyampingkan unsur lainnya.

Problematika ini menjadi menarik untuk diteliti sebab apakah hakim dalam hal ini juga memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan dalam memutuskan perkara tersebut khususnya bagi pemohon. Adat yang dipegang erat oleh keluarga pemohon mungkin bertentangan dengan agama yang dianut. Namun, apakah tidak ada solusi yang diberikan selain bersikeras terhadap salah satu sisi saja tanpa

memperhatikan kedamaian pihak pemohon dan keluarganya? Lalu, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perkara wali *Adhal* dalam problematika hukum adat yang dianut terhadap putusan hakim mengabulkan perkara tersebut. Maka, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Blitar Tentang Wali *Adhal* Disebabkan Adat *Ngalor Ngulon* (Implementasi Asas Keadilan, Kepastian, Dan Kebermanfaatan Dalam Perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disampaikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Blitar perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali *Adhal* Disebabkan Kepercayaan Adat (*Ngalor Ngulon*)?
2. Apakah Penetapan Perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali *Adhal* Disebabkan Kepercayaan Adat (*Ngalor Ngulon*) Secara Hukum Telah Memenuhi Asas Keadilan, Kepastian, Dan Kebermanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penetapan Pengadilan Agama Blitar perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL tentang *Wali Adhal* disebabkan karena kepercayaan adat (*Ngalor Ngulon*).
2. Untuk mengetahui penetapan perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL tentang *Wali Adhal* dengan alasan kepercayaan adat (*Ngalor Ngulon*) telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan ataukah tidak.

D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan khazanah pengetahuan dalam permasalahan bagaimana menyikapi benturan antara hukum adat dan hukum agama serta solusi apa yang ditawarkan oleh agama dalam perkara ini juga sebagai tambahan bahan bacaan atau referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepada penulis, mampu memperkaya karya sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Kepada khalayak dan masyarakat, upaya penulis adalah memahami kepada masyarakat dan khalayak serta memberikan informasi bagaimana penyelesaian sengketa serta bagaimana seharusnya hukum itu lahir, apakah sesuai dengan

tujuan hukum ataukah tidak. Dalam hal ini adalah perkara Wali *Adhal* karena kepercayaan adat yang dianut.

- c. Kepada kalangan akademisi, untuk memperkaya wawasan referensi mengenai penetapan hukum dan mampu mengaplikasikan dalam kajian-kajian ilmiah dalam rangkaian akademik skill sehingga dapat mengasah diri dari panggung pemikiran-pemikiran ulama-ulama dan Hakim sebagai pemberi keadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian. Untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari kepustakaan tersebut dilakukan juga penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini yang bertujuan mencari kaedah atau norma hukum. Dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, peraturan hukum konkrit, dan putusan pengadilan, serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁸

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, bahwasanya penelitian ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang keadaan, karakteristik, dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memaparkan bagaimana Hakim dalam memutuskan perkara juga memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan yang ditujukan kepada pihak yang berperkara serta bagaimana Hakim sebagai wakil dari agama Islam dalam memberikan pendapat atau jawaban atas permasalahan adat yang ada.

3. Sumber Data

Penelitian ini menekankan pada bedah penetapan pengadilan dalam hal ini pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim. Oleh sebab itu, bahan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini bersumber kepada antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Garanit, 2000), cet. 1, h. 58.

1) Putusan/Penetapan Pengadilan

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Hakim
- 2) Kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Tokoh masyarakat dan tokoh adat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.¹⁰

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama Blitar.

b. Interview/Wawancara

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 254.

Wawancara, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara. Wawancara artinya pertemuan langsung kepada objek penelitian dalam upaya pemerolehan data yang faktual, realistis, dan kredibel.¹¹

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu Hakim dan mungkin juga pihak pendukung seperti pemohon ataupun keluarga pemohon serta masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data melalui dokumen, arsip serta protokol yang berkaitan dengan penelitian.¹²

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan arsip dan data-data yang terkait yang terdapat di Pengadilan Agama Blitar.

¹¹ *Ibid*, 254.

¹² *Ibid*, 255.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu dengan cara menganalisa, mengurai, dan mendeskripsikan hasil pengumpulan data. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap diantaranya: (1) Reduksi data, adalah proses memfokuskan data mentah menjadi informasi yang bermakna. (2) Sajian data, adalah mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik atau bentuk lainnya. (3) Menyimpulkan data, adalah mengambil intisari atau kesimpulan akuntabel dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas.¹³ Dalam hal ini, beberapa data-data akan diperoleh di Pengadilan Agama Blitar sebagaimana tertuang di uraian sumber data di atas. Lalu, penulis menganalisis menggunakan teori-teori berkenaan dengan tujuan hukum dengan variabel-variabelnya. Sehingga hal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang objektif, sistematis dan akuntabel.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini adalah upaya untuk menghindari perilaku plagiat dan mempertahankan keaslian dan kemurnian karya. Berikut akan

¹³ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

diuarikan persamaan dan perbedaan beberapa penelitian yang membahas tentang *Wali Adhal* diantaranya:

Skripsi M. Solihul Fitri dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan *Wali Adhal* Di Pengadilan Agama Semarang”¹⁴ Universitas Institut Agama Islam Negeri Wali Songo-Semarang. Dalam skripsi ini persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai analisis Hakim mengenai *Wali Adhal* di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah skripsi Sholihul Fitri membahas Putusan Hakim terhadap *Wali Adhal* disebabkan karena calon mempelai laki-laki memiliki perangai yang buruk. Sedangkan dalam skripsi ini penulis mengambil konsentrasi atau terfokus pada implementasi asas hukum, bukan pada penyebab *adhal*-nya wali dalam menikahkan anak perempuannya.

Skripsi Hendrix Yonaz dengan judul “Pertimbangan Hakim Menetapkan *Wali Adhal* Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang”¹⁵ Universitas Andalas-Padang. Dalam skripsi ini persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai analisis Hakim mengenai *Wali Adhal* di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah skripsi dari Hendrix Yonaz hanya membahas tentang hal-hal yang menjadi faktor penyebab penetapan *Wali Adhal* dengan mengambil lokasi di Pengadilan

¹⁴ M. Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan *Wali Adhal* Di Pengadilan Agama Semarang” sumber: <<http://eprints.walisongo.ac.id/5523/1/102111020.pdf>> diakses pada 17 Juni 2019, pukul 11:35 WIB.

¹⁵ Hendrix Yonaz, “Pertimbangan Hakim Menetapkan *Wali Adhal* Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang” sumber: <http://repository.unand.ac.id/17119/1/skripsi_hendrix.pdf> diakses pada 17 Juni 2019, pukul 11:40 WIB.

Agama Padang. Sedangkan penulis dalam skripsi ini memfokuskan pada implementasi asas-asas hukum pada penetapan Pengadilan Agama.

Tesis Devri Arva Arsandi dengan judul “Penerapan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Penetapan Wali *Adhal* (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0201/Pdt.P/2013/PA JS)”¹⁶ Universitas Gajah Mada. Dalam tesis ini persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai implementasi asas-asas hukum dalam perkara wali *adhal*. Perbedaannya adalah tesis dari Devri Arva Arsandi membahas wali *adhal* dikarenakan wali nasabnya tidak bersedia menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang jelas. Sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang *adhal*-nya wali disebabkan karena kepercayaan adat *ngalor-ngulon*.

Hasil dari pencarian dan penelusuran berbagai referensi dan literatur yang ada, penulis rasa belum ada skripsi yang membahas tentang tema pada skripsi ini. Sehingga dirasa skripsi ini dapat memberikan khazanah dan melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada. Harapannya berguna untuk memperdalam karya-karya ilmiah secara utuh dan akuntabel.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dalam kepenulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Devri Arva Arsandi, “Penerapan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Penetapan Wali *Adhal* (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0201/Pdt.P/2013/PA JS)” sumber: <<http://etd.repository.ugm.ac.id/>> diakses pada 31 Juli 2019, pukul 18:06 WIB.

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis membahas yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kontribusi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini akan diuraikan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian praktik beracara di pengadilan tentang perkara wali *adhal* dari masuknya perkara sampai lahirnya penetapan. Kajian teoritis tentang tujuan hukum dirincikan dengan asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan dengan berbagai macam perspektif para ahli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, dalam bab ini peneliti akan menguraikan data-data yang telah difilter dari sumber-sumber perolehan data dan menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP, Meliputi Kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Pada bagian kesimpulan berisikan butir-butir intisari dan rangkuman dari pokok permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dalam skripsi ini. Pada bagian saran adalah masukan-masukan dan kritik tentang apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Pada bagian rekomendasi ini menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.